

	News Title : Bappebti Keluarkan Izin Profesi 'Expert Advisor' untuk Rekomendasi Berbasis TI	
	Media Name : investor.id	Journalist : Fajar Widhiyanto
	Publish Date : 24 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 90,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 30,000,000
	Section/Rubrication : Business	Topic : Expert Advisor



Bappebti Keluarkan Izin Profesi 'Expert Advisor' untuk Rekomendasi Berbasis TI

Sabtu, 24 September 2022 | 13:03 WIB
Fajar Widhiyanto (@redotai@investor.id)

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 2 September 2022.

"Peraturan ini merupakan salah satu pengaturan teknis sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menempatkan kelembagaan penasihat berjangka sebagai pihak yang dapat memberikan nasihat dalam bentuk rekomendasi kepada klien berbasis teknologi informasi berupa *expert advisor*," jelas Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dilansir laman resmi Bappebti.

Didi menjelaskan, Secara umum substansi Perba Nomor 12 Tahun 2022, pertama, terkait terminologi yang digunakan yaitu Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *expert advisor*. *Expert advisor* merupakan bagian dari persetujuan tambahan yang diberikan Bappebti kepada penasihat berjangka untuk mengembangkan alat bantu transaksi bagi klien yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, harapan, dan karakteristik klien.

Kedua, terkait batasan atau ruang lingkup nasihat dengan menegaskan bahwa pihak yang dapat menawarkan atau memberikan jasa *expert advisor* di bidang perdagangan berjangka adalah penasihat berjangka yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Ketiga, beberapa persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai penasihat berjangka antara lain: memiliki aplikasi, sistem, atau program yang digunakan sebagai *expert advisor* yang memiliki fitur tertentu. Nantinya, fitur dimaksud diverifikasi bursa berjangka untuk direkomendasikan kepada Bappebti dalam rangka persetujuan. Keempat, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi penasihat berjangka dalam menawarkan atau memberikan *expert advisor*. Hal tersebut termasuk bentuk sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bappebti dimaksud.

Dalam kesempatan serupa Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, maraknya penawaran paket-paket investasi berkedok perdagangan berjangka melalui penggunaan robot *trading* mengalami peningkatan pada akhir 2019. Dengan dalih kemajuan teknologi, robot *trading* memberikan iming-iming pendapatan tambahan dengan menjanjikan keuntungan pasti (*fixed income*) atau pembagian keuntungan (*profit sharing*). Sehingga, dengan diterbitkannya Perba Nomor 12 Tahun 2022, kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan, pengembangan, dan penawaran *expert advisor* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) wajib mendapatkan perizinan Bappebti melalui kelembagaan penasihat berjangka.

"Kementerian Perdagangan dan aparat kepolisian bersinergi melakukan penegakan hukum serta mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan penawaran yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian di tengah masyarakat. Praktik penawaran paket investasi melalui robot *trading* yang berkembang di masyarakat biasanya menggunakan sistem perekrutan, member get member dengan memberikan janji keuntungan yang tinggi," tutur Aldison.

Editor : Fajar Widhi (@fajar_widhi@investor.co.id)